

THE HISTORY OF THE
CITY OF NEW YORK

FROM THE FIRST SETTLEMENT
TO THE PRESENT TIME

BY
JOHN B. HENRY
OF THE CITY OF NEW YORK

NEW YORK: 1856.

NEW YORK: 1856.

NEW YORK: 1856.



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 188 TAHUN 2024

TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA
PERINGATAN HARI BURUH INTERNASIONAL (*MAY DAY*)
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperingati Hari Buruh Internasional di Kabupaten Banyumas dan memberikan apresiasi terhadap para pekerja/buruh di Kabupaten Banyumas, perlu adanya kegiatan Peringatan Hari Buruh Internasional (*May Day*) di Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Buruh Internasional (*May Day*) di Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas sebagai Panitia Penyelenggara bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kabupaten Banyumas, Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Banyumas, dan Forum *Human Resources Development* (HRD) Kabupaten Banyumas sebagai Panitia Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Buruh Internasional (*May Day*) di Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research. It also provides a brief overview of the methodology used in the study.

2. The second part of the report is a detailed description of the study area. It includes information about the location of the study area, the population of the study area, and the characteristics of the study area. It also discusses the data sources used in the study.

3. The third part of the report is a detailed description of the study results. It includes information about the findings of the study, the conclusions drawn from the findings, and the implications of the findings. It also discusses the limitations of the study and the need for further research.

4. The fourth part of the report is a detailed description of the study conclusions. It includes information about the overall findings of the study, the conclusions drawn from the findings, and the implications of the findings. It also discusses the limitations of the study and the need for further research.

5. The fifth part of the report is a detailed description of the study recommendations. It includes information about the recommendations made by the study, the reasons for the recommendations, and the implications of the recommendations. It also discusses the limitations of the study and the need for further research.

6. The sixth part of the report is a detailed description of the study references. It includes information about the sources used in the study, the authors of the sources, and the titles of the sources. It also discusses the limitations of the study and the need for further research.

7. The seventh part of the report is a detailed description of the study appendices. It includes information about the appendices used in the study, the contents of the appendices, and the locations of the appendices. It also discusses the limitations of the study and the need for further research.

8. The eighth part of the report is a detailed description of the study index. It includes information about the index used in the study, the contents of the index, and the locations of the index. It also discusses the limitations of the study and the need for further research.

9. The ninth part of the report is a detailed description of the study glossary. It includes information about the glossary used in the study, the contents of the glossary, and the locations of the glossary. It also discusses the limitations of the study and the need for further research.

10. The tenth part of the report is a detailed description of the study bibliography. It includes information about the bibliography used in the study, the contents of the bibliography, and the locations of the bibliography. It also discusses the limitations of the study and the need for further research.

11. The eleventh part of the report is a detailed description of the study acknowledgments. It includes information about the acknowledgments made by the study, the reasons for the acknowledgments, and the implications of the acknowledgments. It also discusses the limitations of the study and the need for further research.

12. The twelfth part of the report is a detailed description of the study executive summary. It includes information about the executive summary used in the study, the contents of the executive summary, and the locations of the executive summary. It also discusses the limitations of the study and the need for further research.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 99 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 100).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Buruh Internasional (*May Day*) di Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Peringatan Hari Buruh Internasional (*May Day*) di Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
 - b. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Peringatan Hari Buruh Internasional (*May Day*) di Kabupaten Banyumas Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana dan;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit berkenaan dengan kegiatan Peringatan Hari Buruh Internasional (*May Day*) di Kabupaten Banyumas Tahun 2024.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Panitia Penyelenggara berkoordinasi dengan Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Buruh Internasional (*May Day*) di Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dan bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan/atau Anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 26 APR 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

No	Jabatan	Paraf
1	Pj. Sekda	
2	Asekbang	
3	Kabag Hukum	
4	KaDinnakerkop UKM	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 188 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN
HARI BURUH INTERNASIONAL (MAY DAY)
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI
BURUH INTERNASIONAL (MAY DAY) DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pj. Bupati Banyumas	Penasihat	
2.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pembina	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banyumas	Penanggung jawab	
4.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Ketua	Drs. Wahyu Dewanto, M.Si.
5.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas Kepala	Wakil Ketua	Sri Sugiarti Susilo, S.Sos.
6.	Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Sekretaris merangkap Koordinator Sekretariat	Tasroh, S.S., MAP., M.Sc.
7.	Analisis Bahan Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	Fadilla Indaryati, S.Sos.
8.	Analisis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	Isnashella Pertiwi Widyastuti, S.I.P.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the general situation and the second section deals with the progress of the work.

2. The second part of the report deals with the results of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the results of the work in the field and the second section deals with the results of the work in the laboratory.

3. The third part of the report deals with the conclusions of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the conclusions of the work in the field and the second section deals with the conclusions of the work in the laboratory.

4. The fourth part of the report deals with the recommendations of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the recommendations of the work in the field and the second section deals with the recommendations of the work in the laboratory.

5. The fifth part of the report deals with the summary of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the summary of the work in the field and the second section deals with the summary of the work in the laboratory.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the general situation and the second section deals with the progress of the work.

2. The second part of the report deals with the results of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the results of the work in the field and the second section deals with the results of the work in the laboratory.

3. The third part of the report deals with the conclusions of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the conclusions of the work in the field and the second section deals with the conclusions of the work in the laboratory.

4. The fourth part of the report deals with the recommendations of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the recommendations of the work in the field and the second section deals with the recommendations of the work in the laboratory.

5. The fifth part of the report deals with the summary of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the summary of the work in the field and the second section deals with the summary of the work in the laboratory.

1	2	3	4
9.	Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Bendahara	Dr. Ani Widosari, S.Pd., M.Pd.
10.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Wakil Bendahara	Ratna Suastuti Restu Wardani, S.H.
11.	Kepala Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Koordinator Seksi Acara dan Hiburan	Maya Yuliani Makudi, S.H.
12.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	Fitria Ratna Sari, S.E.
13.	Analisis Bahan Pengupahan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	Feti Fatimatuz Zahro, S.I.P.
14.	Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Koordinator Seksi Penggalangan Dana dan Bantuan Lainnya	Suntoro, S.Sos., M.M.
15.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	Widhiastuti Setyarini, S.Sos., M.Si.
16.	Analisis Bahan Pengupahan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	Alfidz Baihaqi Ibnu Hasan, S.I.P.

1	2	3	4
17.	Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Koordinator Seksi Dokumentasi dan Humas	Margiati, S.Sos.
18.	Analisis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	Bhilla Aliffitria, S.Sos.
19.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Koordinator Seksi Konsumsi	Sri Haryani, S.E.
20.	Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	Tri Kanti Handayani, S.H.
21.	Analisis Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	Indraswari Nur Imaniati, S.Psi.
22.	Pengelola Bahan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Koordinator Seksi Perlengkapan dan Dekorasi	Samsudin
23.	Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	Anjar Her P, S.Sos.
24.	Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Koordinator Seksi Bazar	Louis Krismanto, S.T.

James B. Smith

Nov 10 1880

James B. Smith

James B. Smith

James B. Smith

James B. Smith

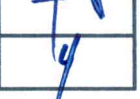
James B. Smith

James B. Smith

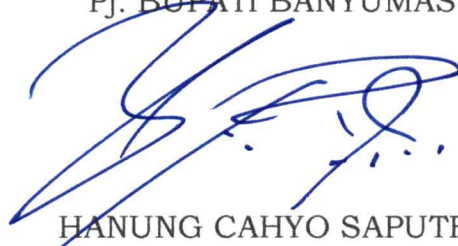
James B. Smith

1	James B. Smith	Nov 10 1880
2	James B. Smith	Nov 10 1880
3	James B. Smith	Nov 10 1880
4	James B. Smith	Nov 10 1880
5	James B. Smith	Nov 10 1880

1	2	3	4
25.	Instruktur Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Koordinator Seksi Kesehatan	Iis Anis Sulandari, S.E.
26.	Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	Teguh Budi Widodo, S.E.
27.	Kepala UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Koordinator Keamanan	Eko Yuniarto, S.Sos.
28.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	Subagyo, S.A.
29.	Kasi Pengendalian dan Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	Tomi Luqman Hakim, S.STP.
30.	Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Koordinator Penerima Tamu dan Peserta	Raden Alfian, S.E.

o	Jabatan	Paraf
1	Pj. Sekda	
2	Asekbang	
3	Kabag Hukum	
4	KaDinnakerkop UKM	

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO